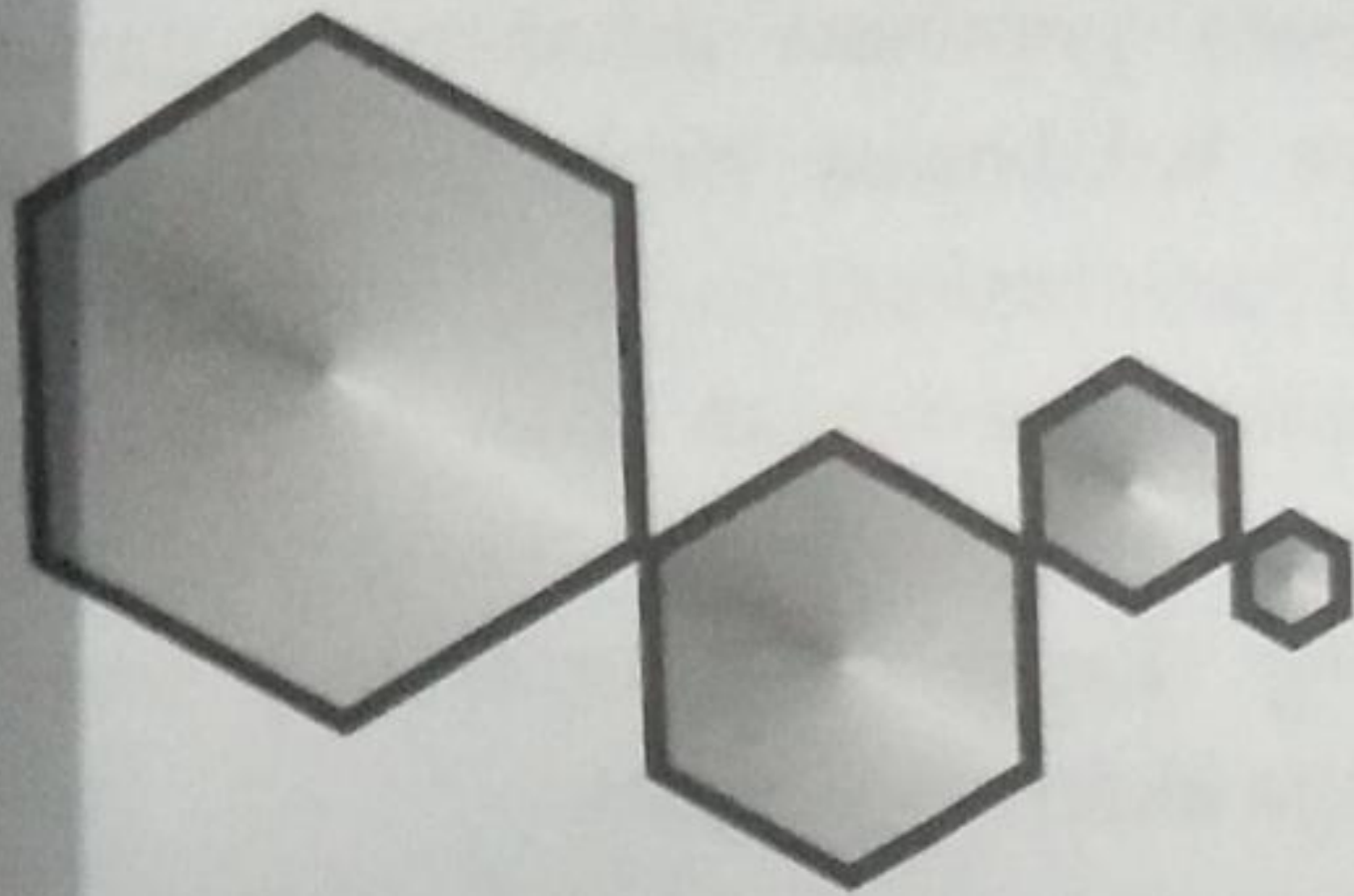


Gender Equality

dan Inovasi Kebijakan Publik

Sebuah Model Inovasi
Kebijakan Perintisan Klaster
dalam Pengembangan
Industri Rumahan Perempuan

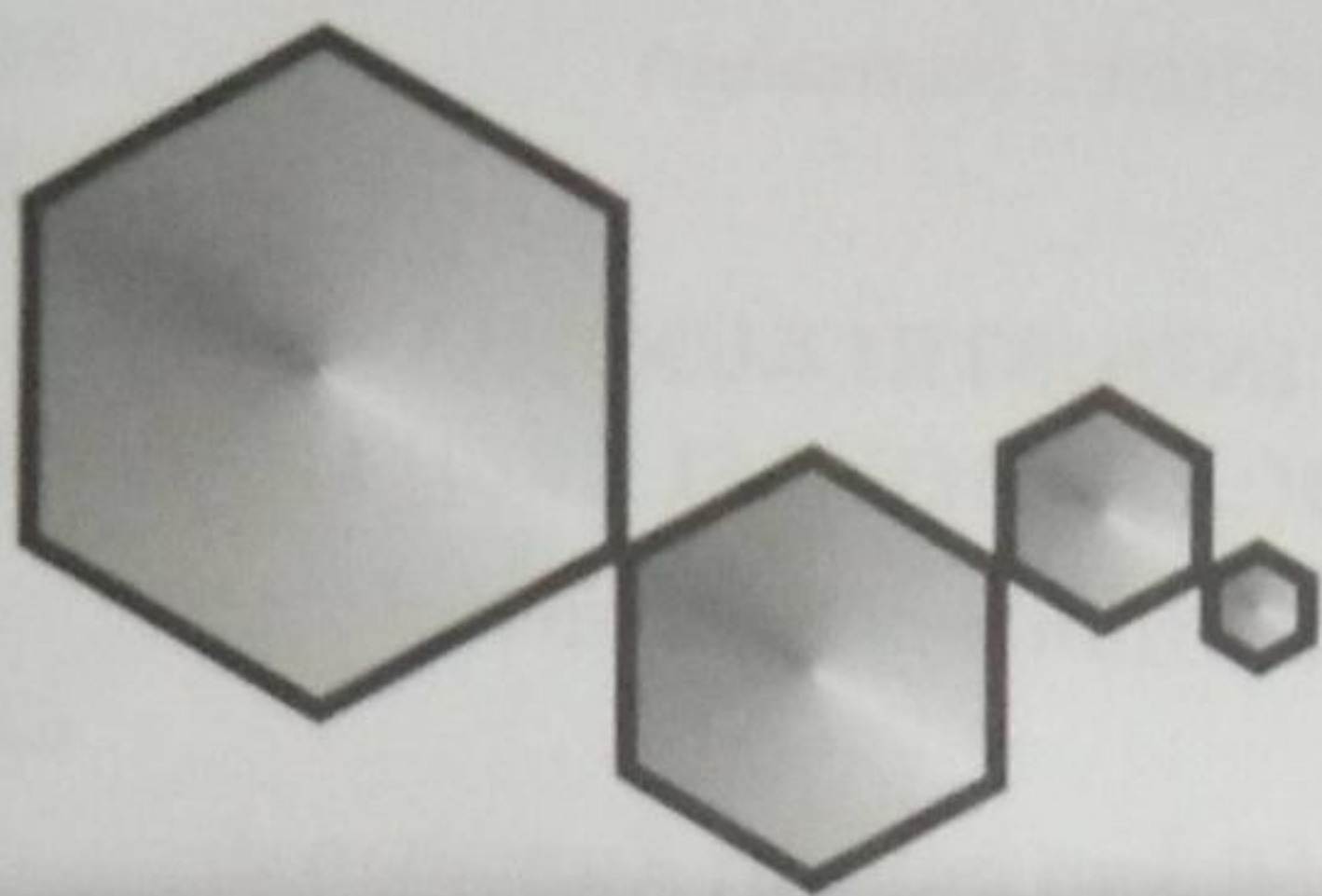
Novita Tresiana | Noverman Duadji



KATA PENGANTAR

Penerapan inovasi kebijakan klaster industri rumahan berbasis model *The Triple Helix* menjadi metode percepatan transformasi tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Adanya Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yang ditujukan pada pengembangan Industri Rumahan perempuan, dalam konteks pembangunan desa, menjadi relevan mengingat fakta pertumbuhan industri rumahan (IR) yang dikelola perempuan di desa semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjanya tertinggal, namun diakui industri rumahan yang dikelola perempuan mampu memainkan peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja.

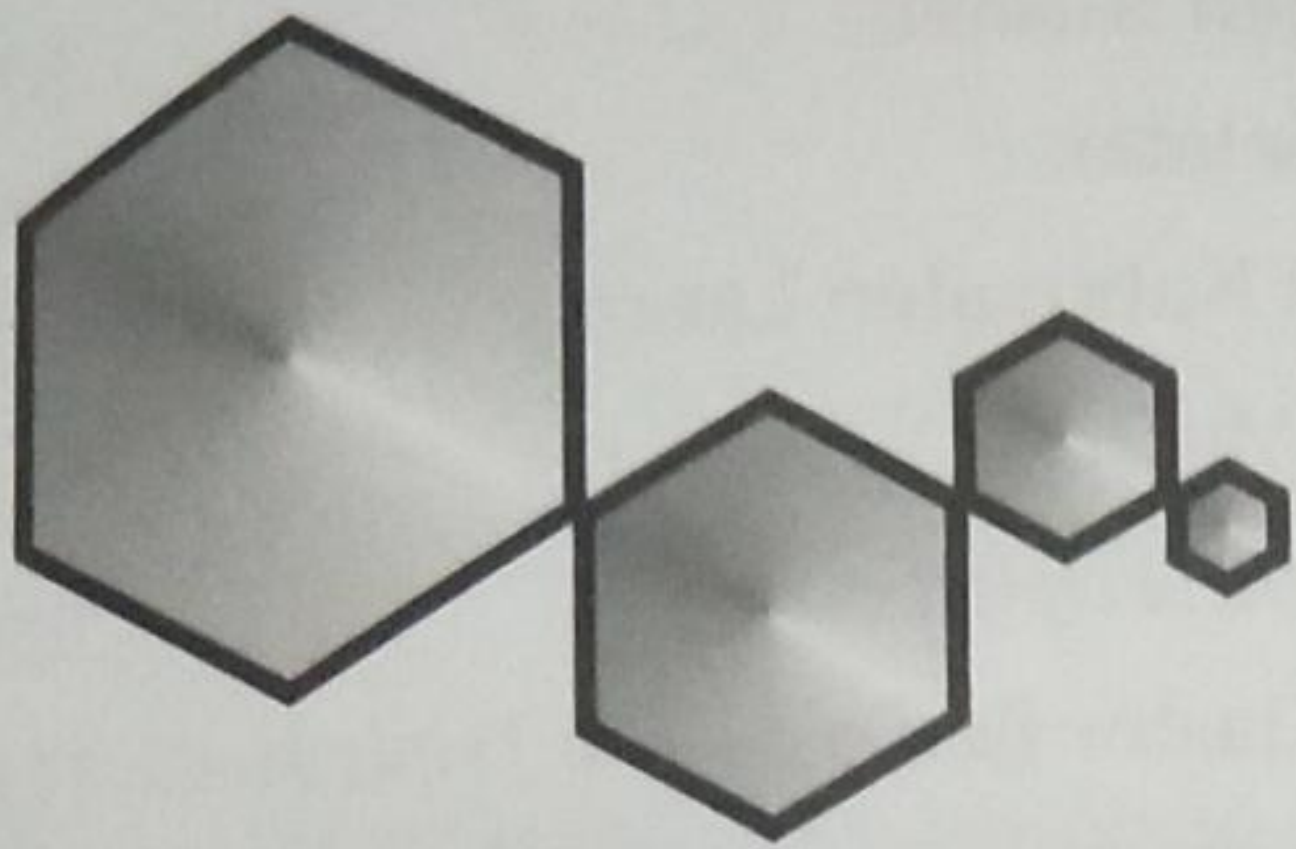
Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan implementasi gender equality sebagai salah satu tujuan *Sustainability Development Goals* (SDGs), utamanya mengantisipasi terjadinya pemiskinan perempuan dikarenakan ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi. Model klaster dan tahapannya menjadi rujukan untuk keberdayaan perempuan. Keseluruhan bab dalam buku ini berisi uraian tentang fakta empirik yang berasal dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat kajian teoritik. Melalui hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mensitensikan kendala dan kekuatan program program pemberdayaan perempuan di Indonesia selama ini.



DAFTAR ISI

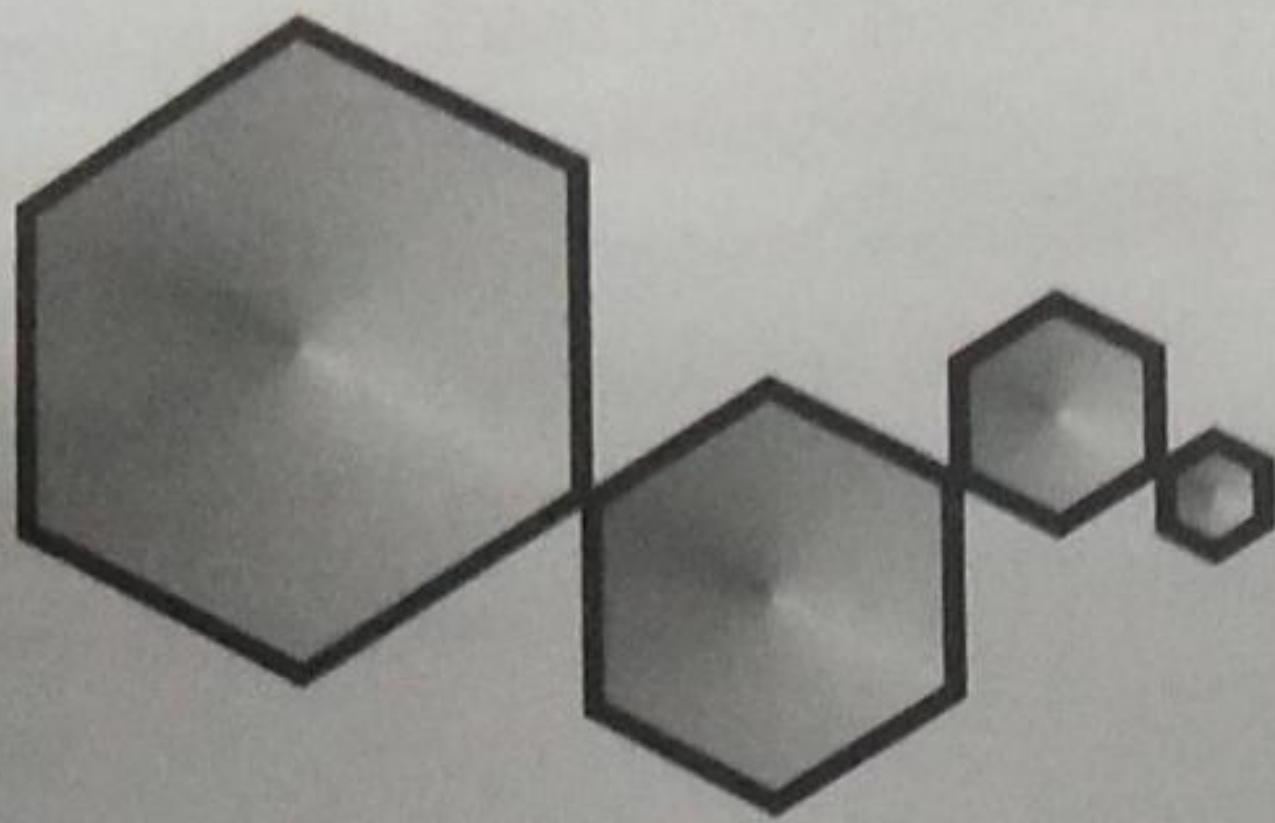
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Isu Gender dan Reposisi Administrasi Publik	3
1.1.1 <i>Governance</i> , Kebijakan Publik dan Reposisi Administrasi Publik	4
1.1.2 Gender dan Administrasi Publik	10
1.2 Pemetaan Isu Gender Bidang Ekonomi	14
1.2.1 Partisipasi Angkatan Kerja Sektor Ekonomi	14
1.2.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri	18
1.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
1.3 Gambaran Umum Isi Buku	25
BAB 2 PERSPEKTIF <i>GENDER EQUALITY</i> DAN KEBIJAKAN KLASTER INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN	27
2.1 Perspektif <i>Gender Equality</i> dan <i>Sustainable Development Goals</i>	29
2.2 Kebijakan Industri Rumahan Kelompok Perempuan	40
2.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan Kelompok Perempuan di Indonesia	47

2.3	Inovasi Kebijakan Klaster Industri Rumahan	51
2.4	Kesimpulan	62
BAB 3	MODEL RINTISAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS <i>TRIPLE HELIX</i>: SEBUAH INOVASI KEBIJAKAN	65
3.1	Mengukur Stratifikasi dan Pertumbuhan Klaster Industri Rumahan	67
3.1.1	Peta Wilayah dan Kebijakan Industri Rumahan di Lampung Selatan	67
3.1.2	Peta Basis Kapasitas Pelaku Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan	86
3.1.3	Peta Pengukuran Perkembangan Klaster Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan	98
3.1.4	Konektivitas	105
3.2	<i>Triple Helix</i> dalam Pengembangan Klaster Industri Rumahan Perempuan	107
3.3	Model Kebijakan Rintisan Klaster Industri Rumahan Berbasis <i>The Triple Helix</i> dalam Mewujudkan <i>Gender Equity</i> Perempuan	109
3.4	Kesimpulan	117
BAB 4	PERAN JARINGAN SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN	119
4.1	Jaringan Sosial	119
4.2	Jaringan Sosial dalam Klaster Industri Rumahan Lampung Selatan	122
4.2.1	Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Tenaga Kerja	123
4.2.2	Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Sumberdaya Ekonomi	123
4.2.3	Keberlanjutan Jaringan Sosial	125
4.3	Kesimpulan	126
BAB 5	PENUTUP	129
	DAFTAR PUSTAKA	133
	TENTANG PENULIS	139



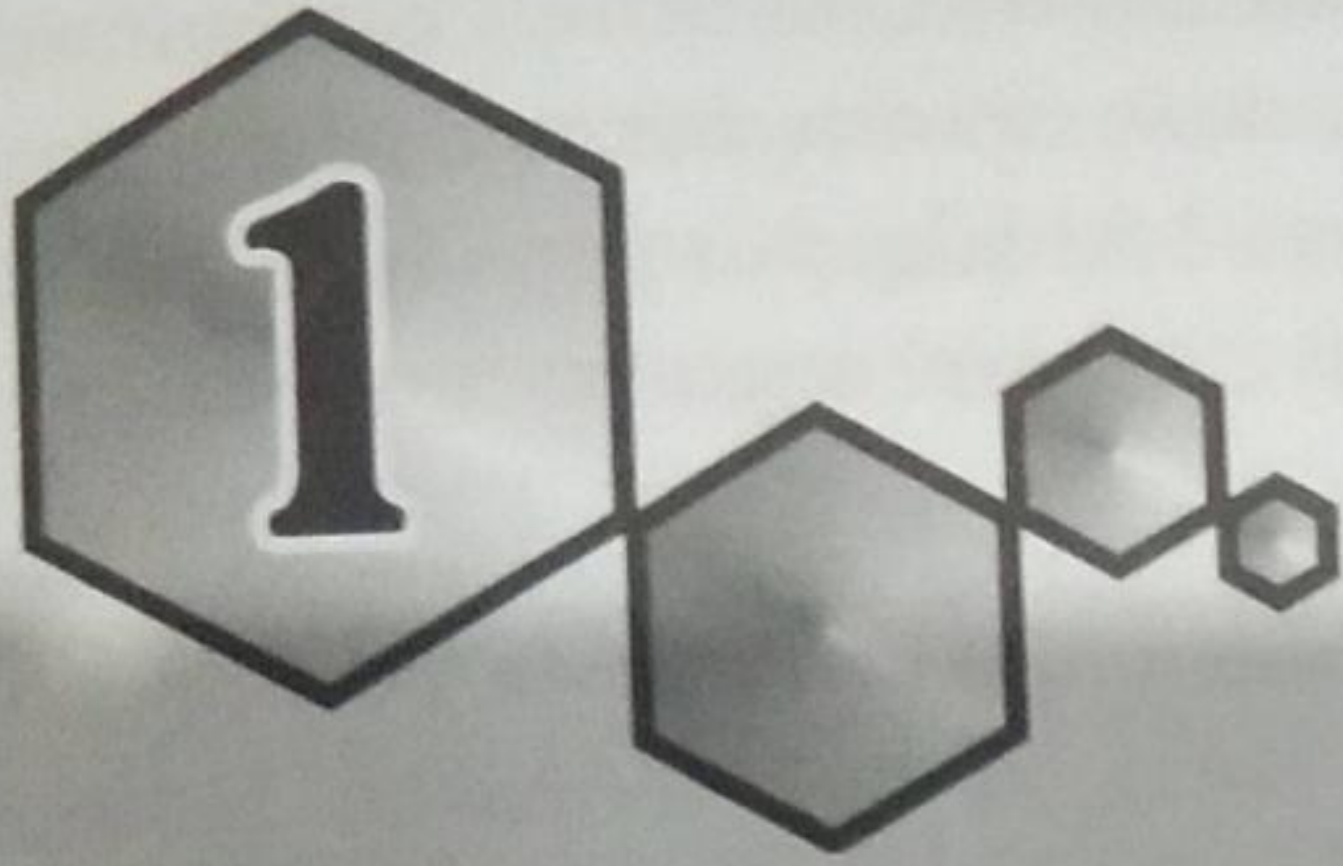
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Empat Institusi Strategis Administrasi Publik	12
Gambar 1.2	Peran Strategis Administrasi Publik dalam mewujudkan <i>Gender Equality</i>	12
Gambar 1.3	Model Peta Dasar Pengamatan Gender pada Administrasi Publik	13
Gambar 1.4	Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, yang bekerja seminggu yang lalu dan pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota dan golongan umur di Provinsi Lampung, Agustus 2018	16
Gambar 1.5	Persentase Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018	19
Gambar 1.6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Menurut Jenis Kelamin Pemilik Usaha dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung 2018	24
Gambar 2.1.	Pekerjaan informal: Hirarkhi penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin	41
Gambar 2.2.	Posisi Industri Rumahan	44
Gambar 2.3.	Model Proses Pengembangan IR	46
Gambar 2.4.	Desain Pengembangan IR	46
Gambar 2.5.	Kategori IR Tahun 2016 dan 2017	49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Gender Equality di Indonesia	35
Tabel 2.2.	Best Practice IR Daerah	49
Tabel 3.1.	Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan	70
Tabel 3.2.	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan	71
Tabel 3.3.	Perkembangan Tenaga Kerja Kab. Lamsel menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin 2013-2015	71
Tabel 3.4.	Indikator Ketenagakerjaan Kecamatan Rajabasa 2014	72
Tabel 3.5.	Batas Desa Canti dan Waymuli Timur	72
Tabel 3.6.	Perbandingan Kondisi Umum Desa Canti dan Desa Waymuli Timur	73
Tabel 3.7.	Kondisi Pemerintahan Desa	73
Tabel 3.8.	Struktur Mata Pencaharian Desa Waymuli Timur	73
Tabel 3.9.	Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Canti	74
Tabel 3.10.	Jenis Kelamin Pelaku IR	75
Tabel 3.11.	Usia Pelaku IR	76
Tabel 3.12.	Tingkat Pendidikan Pelaku IR	76
Tabel 3.13.	Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri	77
Tabel 3.14.	Susunan Tim Pelaksana Pengembangan IR Lampung Selatan	77
Tabel 3.15.	Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan	79



PENDAHULUAN

Gender equality menjadi point penting pembangunan berkelanjutan, yang menggambarkan kondisi, kontribusi dan kemanfaatan pembangunan, dilakukan dan diterima secara setara perempuan dan laki-laki sehingga tercapai keberdayaan ekonomi perempuan (Tresiana dan Duadji, 2019). Kata "gender" sering diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Echols dan Shadily (1983), menggambarkan secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dari literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

Terkait konsep gender, tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*). Tujuan dari merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nugroho (2008) memahami kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. *Gender equity*, merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Adanya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Dalam kesejarahan, *gender equality* telah diperjuangkan sejak abad ke-17, yang hingga saat ini dominasi fakta menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berbagai hal, termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, isu *gender equality* merupakan salah satu isu penting yang masih perlu diperjuangkan. Pada tahun 2000, UN menetapkan *gender equality* sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs). *Gender equality* sebagai salah satu isu utama pembangunan tercantum dalam tujuan ke-3 MDGs yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2015, MDGs berakhir dengan menyisakan fakta bahwa masih terdapat target-target yang belum tercapai baik secara global maupun di Indonesia khususnya dalam hal kesetaraan gender. Seiring dengan berakhirnya program MDGs pada tahun 2015, UN membuat program baru sebagai kelanjutan dari MDGs yakni tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Program ini berlaku baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. *Gender equality* menjadi salah satu dari 17 tujuan SDGs. Isu ini tercantum dalam tujuan ke-5 yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Dalam tujuan ini, SDGs berusaha memastikan agar masalah-masalah yang terjadi pada perempuan seperti diskriminasi gender, kekerasan seksual dan eksploitasi dapat dihentikan.

Responsivitas terhadap tujuan kelima SDGs, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Salah satu paket kebijakan ditujukan pada aktivitas skala usaha mikro atau Industri Rumahan, sebelum dilakukan pengembangan industri rumahan (IR) secara masal. Dalam konteks desa, kebijakan ini menjadi relevan mengingat fakta pertumbuhan industri rumahan (IR) yang dikelola perempuan di desa semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjanya tertinggal, namun IR mampu memainkan

peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja, namun posisinya kurang diperhitungkan dalam memainkan peran bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan model pengembangan industri rumahan (IR) didaerah harus dirubah, yang bukan hanya ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*, namun juga pengembangan inovasi kebijakan, sistem sosial budaya ke arah ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Permasalahan yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*. Selain itu juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya memahami gender, isu-isu gender dan relasinya dalam administrasi publik. Bab ini juga mendeskripsikan reposisi administrasi publik untuk memahami isu gender menjadi sebuah perspektif agar pemerintah, cendekiawan dan swasta hadir, untuk melahirkan inovasi kebijakan. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* untuk mendudukkan pemahaman *governance* sebagai tool dan media melahirkan inovasi kebijakan publik yang berkarakter kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan. Bab ini juga menggambarkan isu-isu krusial gender bidang ekonomi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*trust*) publik, terhadap hasil-hasil pembangunan.

Pada bagian akhir pendahuluan, akan diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1 ISU GENDER DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Memasuki abad 21 administrasi publik memasuki *nation* baru. Administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi negara, fungsinya

peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja, namun posisinya kurang diperhitungkan dalam memainkan peran bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan model pengembangan industri rumahan (IR) didaerah harus dirubah, yang bukan hanya ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*, namun juga pengembangan inovasi kebijakan, sistem sosial budaya ke arah ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Permasalahan yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*. Selain itu juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya memahami gender, isu-isu gender dan relasinya dalam administrasi publik. Bab ini juga mendeskripsikan reposisi administrasi publik untuk memahami isu gender menjadi sebuah perspektif agar pemerintah, cendekiawan dan swasta hadir, untuk melahirkan inovasi kebijakan. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* untuk mendudukan pemahaman *governance* sebagai tool dan media melahirkan inovasi kebijakan publik yang berkarakter kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan. Bab ini juga menggambarkan isu-isu krusial gender bidang ekonomi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*trust*) publik, terhadap hasil-hasil pembangunan.

Pada bagian akhir pendahuluan, akan diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1 ISU GENDER DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Memasuki abad 21 administrasi publik memasuki *nation* baru. Administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi negara, fungsinya

lebih dari itu administrasi publik sebagai instrumen kolektif, sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Pergeseran ini menandai, administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif. Reposisi ini sampai taraf tertentu juga sebagai anti klimak dari praktek administrasi publik yang selama ini berlangsung luas, yang menempatkan segala urusan publik sebagai bagian urusan negara, sarwa negara. Wilayah administrasi publik demikian ini oleh Frederickson (1997) disebut administrasi publik sebagai *governance*. Dengan kata lain administrasi publik sebagai *governance* pada dasarnya administrasi publik yang mempunyai lokus sinergi kiprah pada wilayah publik dengan menyertakan pelaku-pelaku yang genuinely dari publik dengan fokus agenda *interest* publik yang memang menjadi kebutuhannya (*common interest*).

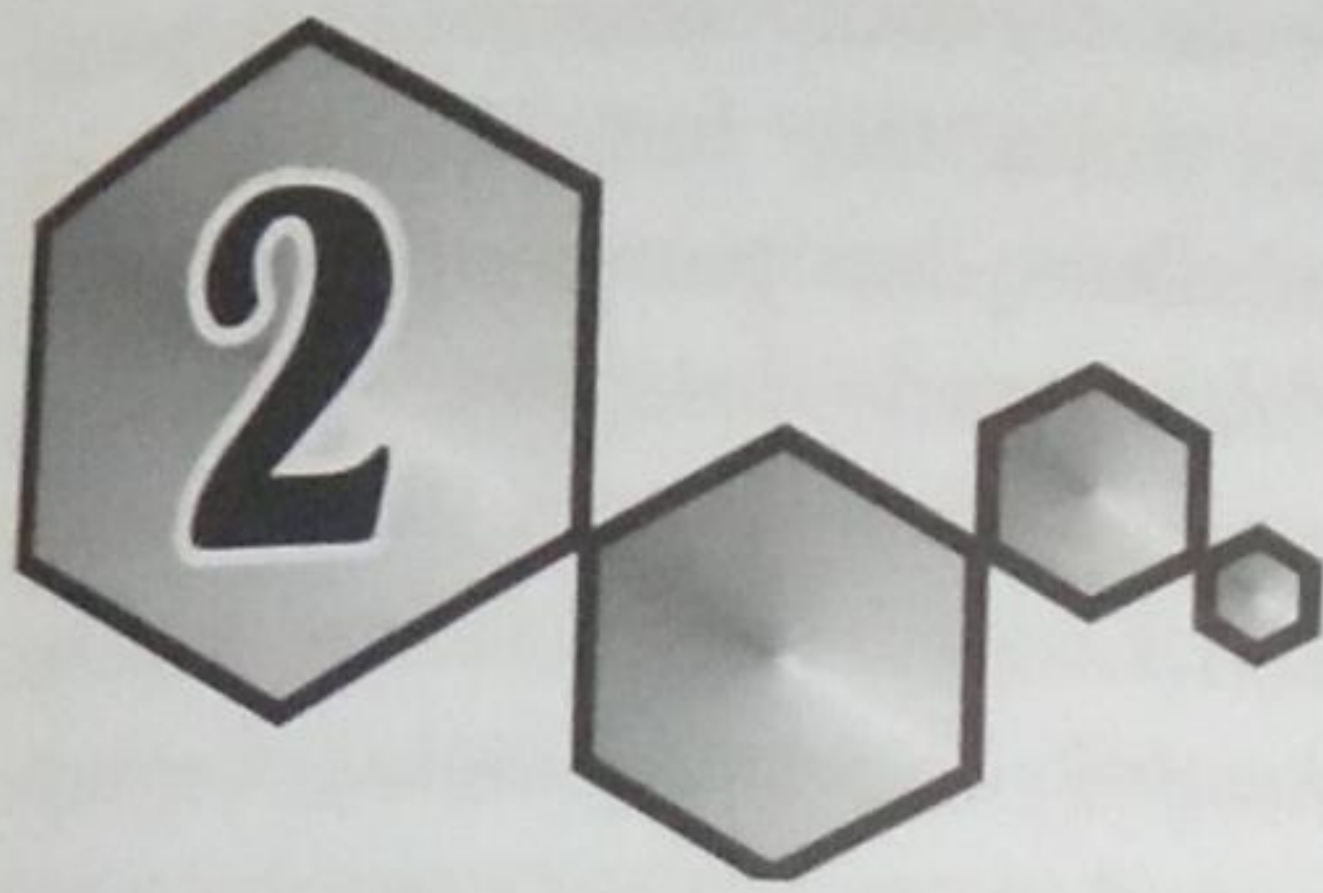
1.1.1 *Governance, Kebijakan Publik dan Reposisi Administrasi Publik*

Modernisasi Administrasi Publik (AP) adalah merupakan faktor terpenting yang memungkinkan demokratisasi dan modernisasi negara berlangsung secara efektif dan efisien di abad 21 ini, abad yang sering dikatakan sebagai *American Century* (Frederickson, 2000). Globalisasi yang melanda seluruh bangsa tanpa kecuali disertai dengan revolusi informasi yang besar telah menempatkan bangsa di dunia hidup dalam sebuah ruang tanpa batas (*borderless*). Ditengah situasi demikian manajemen negara tak dapat lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Demikian pula peran administrasi publik dalam keadaan demikian, tak dapat lagi mementaskan pertentangan kepentingan negara versus rakyat, atau pergulatan kepentingan dalam drama politik. Administrasi publik diharuskan melakukan reposisi atau deformasi kedalam sebuah tatanan kekinian. Menurut Frederickson (1997), ada beberapa alasan mendasar mengapa administrasi publik harus melakukan proses ini. *Pertama*, diantara fenomena penting globalisasi ini administrasi publik kontemporer dihadapkan pada melemahnya batas-batas yurisdiksi dalam berbagai bentuk. Bangsa, negara, provinsi, kota atau bahkan desa telah kehilangan batas-batas fisikalnya. Melemahnya batas yurisdiksi tersebut bahkan telah mengarah menyatunya berbagai kawasan, tanpa pembatas. Revolusi telekomunikasi telah menghilangkan rambu dan batas

fisikal yang pada akhirnya juga merubah berbagai corak hubungan sosial antar manusia, mereka dipautkan dalam batas lintas negara, lintas samudra dalam ruang global. Dalam kondisi demikian, bagaimana memahami kepentingan publik, menjaga kongruen kepentingan dari berbagai aktor seraya mengontrol hubungan yang terjadi. *Kedua*, disartikulasi negara, melembeknya peran negara dalam menangani persoalan-persoalan kompleks yang sumbernya beragam. Sehingga sebuah negara tak dapat secara mandiri menanganinya secara baik. Contohnya adalah munculnya hujan asam, menipisnya lapisan ozon di atas benua Amerika dan Australia, bukan semata kesalahan dari negara tersebut tapi juga bersumber dari perilaku publik dari negara-negara lain. *Ketiga*, makin maluasnya makna kata "publik". Dalam sejarah administrasi publik, yang disebut dengan publik itu identik dengan negara (*government*). Ungkapan publik kini tak lagi terbatas pada negara tetapi juga melingkupi seluruh organisasi-organisasi non negara atau juga institusi-institusi yang secara langsung melakukan kontrak kerja dengan negara untuk mewujudkan tugas publik. Organisasi parastatal, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Perdebatan tentang *good governance* dan *good government* adalah merupakan tema penting di era globalisasi ini. Berbagai bantuan dan kerjasama multi lateral tak jarang mensyaratkan dua tema tersebut dapat dihadirkan dalam sistem politik dan kebijakan publik sebuah negara. Tak terkecuali IMF, Bank Dunia, UNDP juga memberikan restriksi luas apabila negara resepien tak dapat mengintegrasikan *good governance* dan *good government* dalam pemerintahannya. Banyak analis menyatakan bahwa dengan prasarat seperti itu ada kesan, negara donor ataupun lembaga-lembaga asing telah mendekte berbagai idiom politik, dan kebijakan publik kepada negara-negara berkembang. Dan bahkan acapkali negara-negara dana lembaga donor dipersalahkan sebagai agen *neo-imperealis* yang melakukan penjajahan dalam format baru.

Perkembangan istilah dan makna kata *governance* telah menjadi konsep payung dari sejumlah terminologi dalam kebijakan dan politik. Pierre Jon and B. Guy Peters, (2000) mengutip beberapa tulisan yang seringkali digunakan secara serampangan untuk menjelaskan: jaringan kebijakan (*policy networks*), manajemen publik (*public management*), koordinasi antar sektor ekonomi, kemitraan publik-privat, *corporate governance* dan *good govenance*



PERSPEKTIF *GENDER EQUALITY* DAN KEBIJAKAN KLASSTER INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN

Penjabaran optimalisasi, keberdayaan inovasi potensi-potensi sosial budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan inovasi model pemberdayaan kapasitas masyarakat, yang berfokus proses pembelajaran, penguatan kapasitas kelompok perempuan. Kelompok perempuan memerlukan penguatan kapasitas individu, entitas dan jejaring, juga kemandirian sosial dan ekonomi. Diperlukan intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai solusi bukan saja untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, tetapi juga ketercapaian *gender equality*.

Pemerintah melalui *leading sector* utamanya, yaitu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI), hadir dengan mengeluarkan paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Tahun 2014, untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016, dilaksanakan program pembangunan industri rumahan (IR) secara masal, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Fokus pengembangan industri rumahan diarahkan pada upaya mengakhiri 3 (tiga) pokok utama, yang disebut *3ENDs*, yaitu: (1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) mengakhiri perdagangan manusia, dan (3) mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Kebijakan Industri Rumahan (KIR), adalah sebuah alternatif kebijakan yang memiliki keunggulan menekankan lokalitas, baik kelembagaan, komunitas, lingkungan, kultur, ada pemihakan dan pemberdayaan yang dipahami sebagai proses transformasi hubungan sosial, ekonomi, dan perlindungan usaha perempuan. Karakter kebijakan berciri *transformative* dan *transactive planning*, *bottom up*, *community empowerment* dan *participative* menjadikan kebijakan ini sebagai inovasi model yang cukup efektif, terpadu, berkesinambungan, spesifik dan operasional, dengan berbasis pembelajaran yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku industri rumahan perempuan.

Berkaitan dengan hal itu, beberapa publikasi yang dilakukan Tresiana dan Duadji, memberikan peta jalan proses ketercapaian *gender equality* melalui inovasi pengembangan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk ketercapaian kondisi pelaku industri rumahan yang mandiri, memiliki ketahanan, *networking*, inovasi dan kreatifitas serta memiliki jiwa wirausaha yang handal. Publikasi Tresiana & Duadji Tahun 2018, "*Social Entrepreneur Model for Tourism Development in Kiluan Bay*", menggambarkan potensi masyarakat Teluk Kiluan yang lebih dari hanya sekedar pelaku/wirausaha ekonomi, melainkan *social entrepreneur* merupakan potensi yang bisa diciptakan dalam komunitas masyarakat. Publikasi yang berjudul "*Multi Stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy*" (2016), menggambarkan modal sosial masyarakat pedesaan yang menjadi kekuatan dasar bagi lahirnya kebijakan yang unggul. Kedua penelitian di atas, memberi hasil adanya potensi sosial budaya masyarakat yang bisa dikembangkan untuk keberhasilan pembangunan. Publikasi yang berkaitan dengan penguatan *governance* dan inovasi kebijakan *gender equality*, tergambar pada publikasi "*A Participation model based on community forum as reproductive health knowledge transaction space to indrease male participation in vasectomy*" (2018). Rekomendasinya adalah pemanfaatan ruang terbuka warga untuk ketercapaian *gender equality*.

Selanjutnya Duadji (2012) melalui publikasi berjudul "*Good Governance dalam Pemerintah Daerah*" merekomendasikan pemerintah lokal merevitalisasi dan mereformasi tata kelola hubungan pemerintah-masyarakat melalui inovasi kebijakan dengan partisipasi masyarakat dalam tata hubungan yang baru. Publikasi Tresiana (2015) "*Perumusan Kebijakan*

yang *berperspektif Gender di Propinsi Lampung*” mendapatkan hasil, perlunya kebijakan afirmatif untuk mengintegrasikan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu kelompok perempuan perlu diberikan perlindungan, kebijakan, skill, pendidikan dan kekuasaan. Penelitian di atas, diperkuat dengan survei yang dilakukan Tresiana dkk bekerjasama dengan KPPPA RI (2017) “*Analisis Potensi Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Timur*”. Survei mendapati potensi-potensi IR kelompok perempuan yang memerlukan strategi pengembangan yang tepat dan lebih operasional.

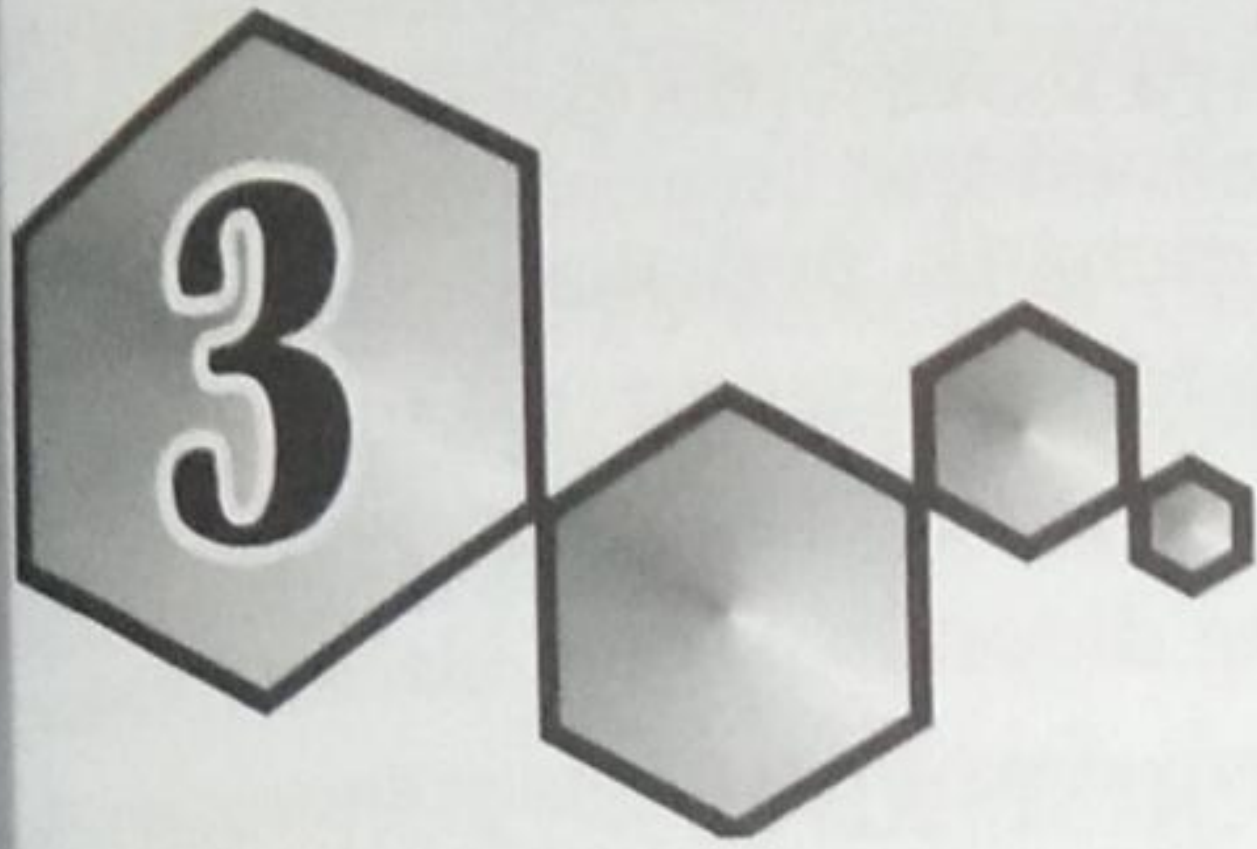
Pada bab kedua ini secara rinci menguraikan perspektif global untuk memahami isu-isu *gender equality*, khususnya ekonomi. Dua perspektif, yakni *sustainable development goals (SDGs)* dan *gender equality* sebagai bagian dari perspektif *Gender equality and Social Inclusion (GESI)*, menjadi basis untuk memahami keberdayaan dan kesejahteraan kelompok perempuan. Wujud implementasi keduanya tergambar dalam model afirmatif berupa kebijakan klaster industri rumahan (KIR). Elaborasi gagasan perspektif dan model diharapkan menjadi inovasi yang mampu mengantisipasi persoalan dan isu-isu pemberdayaan bidang ekonomi kelompok perempuan secara cerdas dan memberi keberpihakan dan harapan bagi kesejahteraan kelompok khususnya perempuan dan juga masyarakat.

2.1 PERSPEKTIF GENDER EQUALITY DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Perspektif *gender equality* dan *sustainable development goals (SDGs)*, merupakan hasil perdebatan dan penelitian yang memahami makna gender dan perspektif pembangunan dalam aras global. Kata *gender* diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara *etimologis* kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. *Gender* juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Konsepsi dasar pemaknaan ini yang selanjutnya memunculkan ketimpangan gender. Gambaran perwujudan implementasi kesetaraan gender (*gender equality*), dalam konteks lokal masih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Penelitian yang dilakukan Tresiana (2015) di Propinsi Lampung mendapati gambaran ketidakadilan yang dominan sebagai

berikut: *Pertama*, Marginalisasi Perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan (penyingkiran/pemiskinan) kerap terjadi di lingkungan sekitar. Nampak contohnya yaitu banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Dengan hal ini banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja. *Kedua*, Subordinasi. Terdapat juga bentuk keadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan dianggap makhluk yang lemah, sehingga sering sekali kaum adam bersikap seolah-olah berkuasa (wanita tidak mampu mengalahkan kehebatan laki-laki). *Ketiga*, Pandangan stereotype. Stereotype dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan), Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

Diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang. Paham *patriarki* yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan telah menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. *Stereotype* yang terekam dalam benak masyarakat adalah perempuan hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga.



MODEL RINTISAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS *TRIPLE HELIX*: SEBUAH INOVASI KEBIJAKAN

Industri rumahan (IR) telah membuktikan proporsi kontribusinya yang signifikan dan terus meningkat dalam dinamika perkembangan ekonomi, terutama di desa. IR merupakan potensi besar yang ada di masyarakat yang jika dikelola dengan baik, akan memberi nilai tambah yang sangat signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha IR adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari pekerjaan mereka meningkat dan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk memajukan dirinya. Upaya untuk meningkatkan IR ini juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan yang akan mengurangi resiko perempuan untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti pekerja migran tanpa persiapan yang cukup.

Namun demikian, pengembangan industri rumahan memiliki beberapa kendala antara lain adalah modal, pasar, sarana prasarana, inovasi, dukungan pemerintah dan kapasitas diri. Dibutuhkan intervensi pengelompokan industri rumahan dalam satu kawasan yang berdekatan, yang mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Kedekatan lokasi dimaksudkan untuk meningkatkan kontak antar perusahaan dan meningkatkan nilai tambah pada pelaku yang terlibat dalam klaster. Kedekatan lokasi juga berperan dalam menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Keunggulan dibentuknya klaster industri adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya

transportasi dan transaksi, mengurangi biaya sosial, menciptakan asset secara kolektif, dan meningkatkan terciptanya inovasi (Bappenas, 2006).

Fenomena klaster industri telah menarik perhatian para ekonom untuk terjun dalam studi masalah lokasi sehingga memunculkan paradigma baru yang disebut ekonomi geografi baru (Kuncoro, 2002), Porter (1998) melalui penggambaran peta ekonomi yang didominasi oleh klaster (*cluster*). Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Sedangkan makna "industri" sendiri mempunyai arti luas sebagai himpunan bisnis tertentu, bukan hanya industri pengolahan atau manufaktur saja. Sehingga makna "klaster industri" adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah (Taufik, 2011). Kelompok industri spesifik tersebut merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri inti) yang menjadi "fokus perhatian" industri pendukungnya dan industri terkait, pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi (perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* serta pembeli yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*).

Pengembangan klaster, membutuhkan intervensi beberapa pihak untuk mendorong munculnya pionir-pionir baru dan mengembangkan sayap pelaku IR perempuan yang berkualitas, yaitu pihak akademisi perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku bisnis yang terangkum dalam model Triple Helix. Model triple helix, menjadi payung yang menghubungkan antara Cendekiawan (*Intellectuals*), Bisnis (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan ekonomi perempuan. Dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri rumahan. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi pemberdayaan perempuan yang akan menentukan pengembangan ekonomi berkesinambungan.

Bab ini akan membahas bagaimana mengukur stratifikasi klaster industri rumahan melalui dimensi basis IR, kelembagaan, aktivitas usaha, lin-

erja usaha, konektivitas. Pengukuran menghasilkan tipologi/strata kluster. Selanjutnya membahas penjabaran rancangan inovasi kebijakan kluster industri rumahan dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasikan peran Akademisi, *Business* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan kluster IR. Pada bagian ini, juga dilakukan pemetaan pelaku IR, kapasitas dan kendala pelaku IR.

3.1. MENGUKUR STRATIFIKASI DAN PERTUMBUHAN KLASER INDUSTRI RUMAHAN

Lampung Selatan merupakan salah satu lokus industri rumahan di Propinsi Lampung, yang sebagian besar dikelola oleh perempuan. Diakui peran pemerintah dalam pengembangan IR awalnya masih sangat minim dan terbatas pada pemberian pelatihan-pelatihan atau penyuluhan yang sporadis serta seringkali tidak tepat sasaran. Kelompok IR yang didominasi perempuan masih harus berjuang sendiri di tengah persaingan pasar yang tidak seimbang dan derasnya produk impor UKM negara tetangga. Disisi lain, jumlah masyarakat yang dihidupi oleh IR banyak dan potensi IR sebagai pendukung ketahanan ekonomi nasional dan pengembangan SDM cukup signifikan. Banyak perubahan yang dilakukan pemerintah, mulai dari kebijakan, modal dan penyediaan pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2019) dengan lokus industri rumahan di Desa Canti dan Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dengan tema "Model Kluster Pengembangan Industri Rumahan dalam mewujudkan *Gender equality* Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan", mendeskripsikan pemetaan gambaran basis kapasitas kluster industri rumahan perempuan, sekaligus menggambarkan elemen-elemen penting pertumbuhan dan stratifikasi kluster industri rumahan yang dikelola oleh kelompok perempuan.

3.1.1 Peta Wilayah dan Kebijakan Industri Rumahan di Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di ujung selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan jasa ke provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera maupun Provinsi Lampung secara khusus. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 2007,01

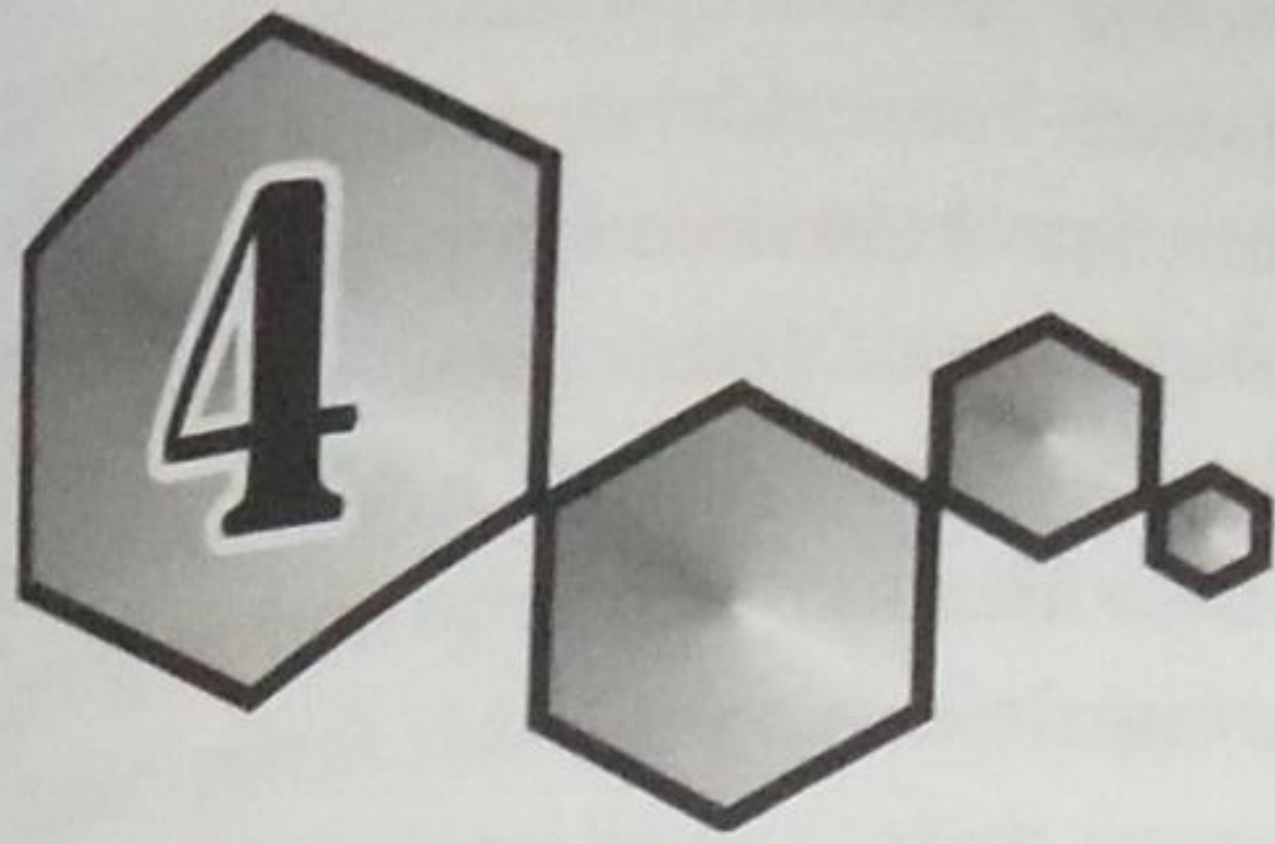
km² ini beribukota di Kota Kalianda (BPS Lampung Selatan, 2016A). Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 251 desa/kelurahan (248 desa dan 3 kelurahan) (BPS Lampung Selatan, 2016A). Dengan garis pantai yang panjang terdapat 39 desa yang lokasinya dekat tepi laut, yaitu desa yang berada di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Sragi, Ketapang dan Bakauheni. Wilayah di Sumatera masih banyak dikelilingi hutan. Ada sekitar 24 desa di Lampung Selatan yang lokasinya berada di sekitar hutan. Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang berada di sekitar hutan.



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang



PERAN JARINGAN SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN KLASTER INDUSTRI RUMAHAN

4.1. JARINGAN SOSIAL

Sebuah jaringan sosial adalah hubungan-hubungan sosial relatif berlangsung lama dan terpola. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi sekali saja di antara dua orang individu bukan merupakan jaringan sosial. Jaringan sosial penting dalam transaksi atau pertukaran ekonomi. Pemaknaan jaringan sosial dalam transaksi ekonomi ditunjukkan oleh Granovetter (2005), Biggart (2001), Macalalay (1963), Podolny (1998). Jaringan sosial yang padat yang melibatkan banyak orang (anggota) dalam suatu komunitas bisa mencegah terjadinya pelanggaran norma, mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan solidaritas sosial (Coleman, 1988). Masyarakat yang komunitasnya memiliki banyak jaringan sosial padat lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi (Putnam, 1993). Arti penting jaringan sosial dalam pertukaran ekonomi baru disadari oleh para ahli sosiologi setelah tulisan Granovetter diterbitkan. Granovetter mengkritik pandangan Williamson yang terlalu menekankan sisi rasional pertukaran ekonomi.

Menurut Williamson (dalam Granovetter, 2005), terdapat dua bentuk pertukaran, yaitu pertukaran pasar dan pertukaran hierarkhi. Pertukaran pasar dilakukan jika pertukaran terjadi secara langsung, tidak berulang dan tidak memerlukan banyak waktu, energi, dan uang (investasi spesifik transaksi). Pertukaran dalam hierarkhi akan dilakukan jika transaksi dalam

hierarkhi bisa mengatasi masalah waktu, energi dan uang. Dalam pertukaran hierarkhi proses transaksi diinternalisir dalam hierarkhi untuk dua alasan: *Pertama* adalah rasionalitas terbatas yang berupa ketidakmampuan individu untuk mengantisipasi sejumlah ketidakpastian. Jika proses transaksi diinternalisir maka individu tidak perlu mengantisipasi ketidakpastian tersebut karena ketidakpastian tersebut bisa diatasi dengan otoritas yang ada dalam organisasi sehingga tidak memerlukan negoisasi yang rumit. *Kedua*, dengan internalisasi tersebut oportunistik (*seeking interest with guile*) bisa diatasi dengan otoritas dalam organisasi (Powell, 1990).

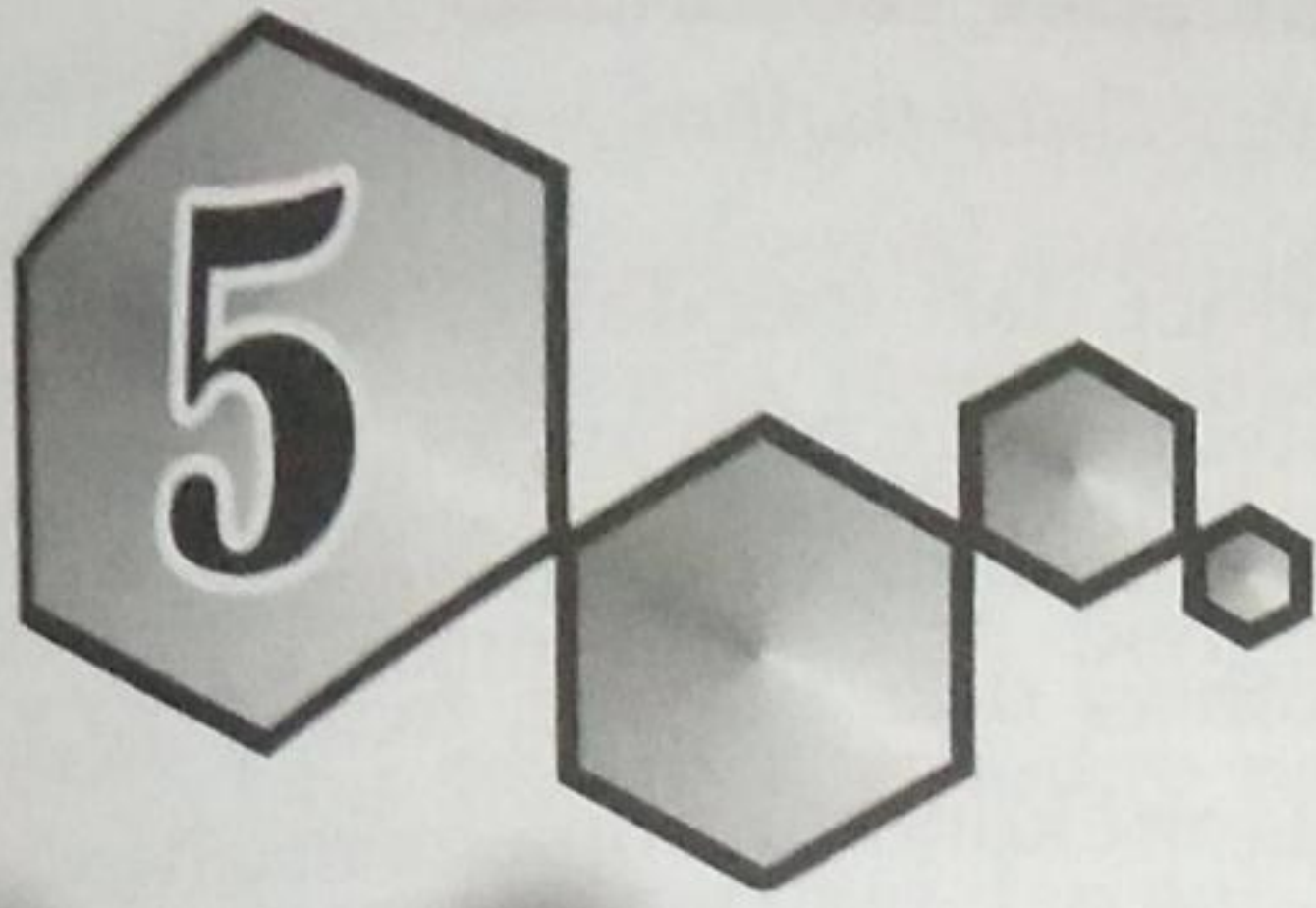
Granovetter (2005) mengatakan bahwa tindakan ekonomi (misalnya pertukaran atau jual-beli) selalu melekat pada hubungan-hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial dan struktur hubungan sosial (atau jaringan) akan menghasilkan kepercayaan (*trust*) dan mencegah terjadinya penyimpangan (*malfeasance*) oleh aktor ekonomi. Ada alasan mengapa demikian: (a) Dalam hubungan sosial individu akan memberikan informasi lebih murah, (b) informasi tersebut lebih baik, lebih kaya dan akurat, (c) individu yang memiliki hubungan secara terus-menerus akan memiliki motif ekonomi agar dirinya dapat dipercaya, dan (d) hubungan-hubungan ekonomi secara terus-menerus akan disertai dengan isi sosial yang membawa harapan kuat untuk dipercaya dan menghindari oportunistik (Granovetter, 2005).

Podolny menunjukkan bahwa pertukaran jaringan merupakan alternatif dari pertukaran dalam hierarkhi dan pertukaran pasar. Podolny mendefinisikan bentuk organisasi jaringan (pertukaran jaringan) "sebagai sekumpulan aktor yang melakukan hubungan pertukaran secara berulang dan terus menerus satu dengan yang lain dan, pada saat yang sama, tidak ada yang memiliki otoritas organisasional untuk melakukan arbitrase dan memecahkan perselisihan yang muncul selama pertukaran" (Podolny *et al*, 1998). Definisi ini menunjukkan bahwa dalam bentuk organisasi jaringan, pertukaran ekonomi melekat pada hubungan-hubungan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Granovetter.

Unit usaha atau organisasi proses produksi pada saat yang sama bisa menggunakan pengaturan hierarkhi, pasar dan jaringan sosial dalam pertukarannya. Dalam kondisi bagaimana unit usaha menggunakan jaringan sosial pertukaran, Jones menunjukkan bahwa ada empat kondisi

yang memunculkan pengaturan jaringan, yaitu (Jones *et al*, 1997): (a) Ketidakpastian permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan disgregasi vertikal dengan cara melepaskan unit-unit usaha yang sebelumnya menjadi bagian perusahaan tersebut, terutama melalui *outsourcing* atau sub-kontrak. (a) Transaksi atas dasar pesanan yang membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Transaksi ini menciptakan ketergantungan antara dua belah pihak. Misalnya, kalau pembeli membatalkan pesanan maka penjual mengalami kesulitan untuk menjual pada pembeli yang lain, sebaliknya pembeli juga tidak bisa dengan mudah mengalihkan pada penjual yang lain. (c) Kompleksitas pekerjaan di bawah tekanan waktu. Kompleksitas pekerjaan menunjuk pada sejumlah masukan khusus dan berbeda-beda yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kompleksitas pekerjaan memunculkan saling ketergantungan dalam perilaku. Kompleksitas tugas dengan tekanan waktu juga akan mendorong koordinasi yang fleksibel. Dan (d) Frekuensi pertukaran. Frekuensi pertukaran yang tinggi di antara pihak-pihak yang terlibat mendorong penggunaan jaringan sebagai bentuk pengaturan alternatif.

Jones *et al* (1997) menunjukkan bahwa jaringan-jaringan sosial yang tertutup dan padat bisa mendukung kegiatan industri yang produksinya berdasarkan pesanan, membutuhkan kecepatan dan melibatkan banyak orang dengan beragam keahlian. Kegiatan industri tersebut tidak efisien kalau dilakukan dalam organisasi birokratis. Industri seperti ini cepat mengalami perubahan. Dalam industri tersebut informasi dan pengetahuan mudah menyebar karena tingginya mobilitas pekerja dari satu unit usaha ke unit usaha lain. Dalam jaringan tersebut informasi mengenai reputasi pekerja juga mudah menyebar. Penyebaran informasi membuat norma-norma profesi dan budaya umum mudah terbentuk dan efektif penerapan sanksinya terhadap perilaku menyimpang (Jones *et al*, 1997). Ketidakpastian permintaan yang dikemukakan oleh Jones tersebut di atas erat hubungannya dengan lingkungan institusional persaingan atau pasar bebas yang dikemukakan oleh Nee (2005) dan konteks institusional yang dikemukakan oleh Powell (Powell, 1990). Powell menunjukkan bahwa jaringan ikatan kuat mendominasi dalam industri yang bersifat kerajinan (*craft industries*). Industri ini misalnya berupa industri konstruksi, penerbitan, film dan rekaman (Powell, 1990).



PENUTUP

Reposisi administrasi publik dalam memahami *gender equality*, telah menjadi perspektif sentral dalam memahami kehadiran pemerintah (*Government*), cendekiawan (Universitas) dan swasta (Bisnis/industri) untuk hadir, dan melahirkan inovasi kebijakan. Pemahaman *governance* menjadi penting, sebagai *tool* dan media untuk lahirnya inovasi kebijakan publik yang berkarakter kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan. Reposisi administrasi publik mengambil peran strategis dalam ketercapaian *gender equality*, karena fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Dengan menjadikan administrasi publik sensitif gender, maka perspektif *gender equality* dapat berjalan cepat dan efektif.

Berbagai isu-isu krusial gender bidang ekonomi, akan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*trust*) publik, terhadap hasil-hasil pembangunan, terutama hasilnya bagi kelompok perempuan. Adanya fenomena kegagalan strategi pengembangan model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan, dikarenakan strategi pengembangan dilakukan secara sporadis dan insidental, tidak berbasis model pembelajaran masyarakat sehingga dampak perkembangan usaha kelompok perempuan sulit dimonitor dan dievaluasi. Fakta pertumbuhan jenis usaha yang dikelola perempuan semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjanya tertinggal, namun kelompok usaha yang dilakukan perempuan mampu me-

mainkan peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja.

Pada bab-bab sebelumnya secara rinci dan mendalam berdasarkan hasil-hasil penelitian didukung oleh teori-teori yang relevan, telah diuraikan perspektif *gender equality* dan perspektif *sustainability development goals* (SDGs), sebagai sebuah konsep pemahaman dan payung makro dalam mewujudkan kesetaraan perempuan di bidang ekonomi. Implementasi kedua perspektif tergambar nyata dari pendekatan afirmatif melalui kebijakan industri rumahan (KIR), yang menampakkan peran dan kerja perempuan pelaku industri rumahan (IR), melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sebagai wujud kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Strategi IR telah merubah terminologi pekerja rumahan dengan mensejajarkan industri rumahan perempuan yang terklasifikasi pada pelaku usaha mikro. Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting. Selanjutnya Inovasi kebijakan klaster menjadi output yang diharapkan memiliki strategi maksimal untuk mengembangkan wilayah dalam pemanfaatan potensi ekonomi.

Penerapan inovasi kebijakan klaster industri rumahan dimulai dengan pengukuran stratifikasi klaster, melalui pengkajian awal gambaran elemen-elemen penting bagi pembentukan klaster dan tipologi klaster, dapat berguna dan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan konsep dan bentuk klaster yang ideal untuk diterapkan bagi pelaku usaha kelompok perempuan. Model Triple Helix menjadi payung yang menghubungkan antara Universitas (*Intellectuals*), Bisnis/industri (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan pemberdayaan ekonomi. Gagasan model lahir sebagai strategi yang mendorong perkembangan klaster pada masing-masing stratifikasi perkembangan klaster. Konsep utama desain model kebijakan adalah spesialisasi /kekhususan klaster industri rumahan (IR) dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasi peran universitas, *Business/industry* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan klaster. Output, diperoleh desain strategi yang menyangkut kebijakan pemerintah yang diperlukan dan infrastruktur yang dibutuhkan *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta inovasi produk-produk dan penawaran yang ditawarkan oleh sebuah klaster wilayah.

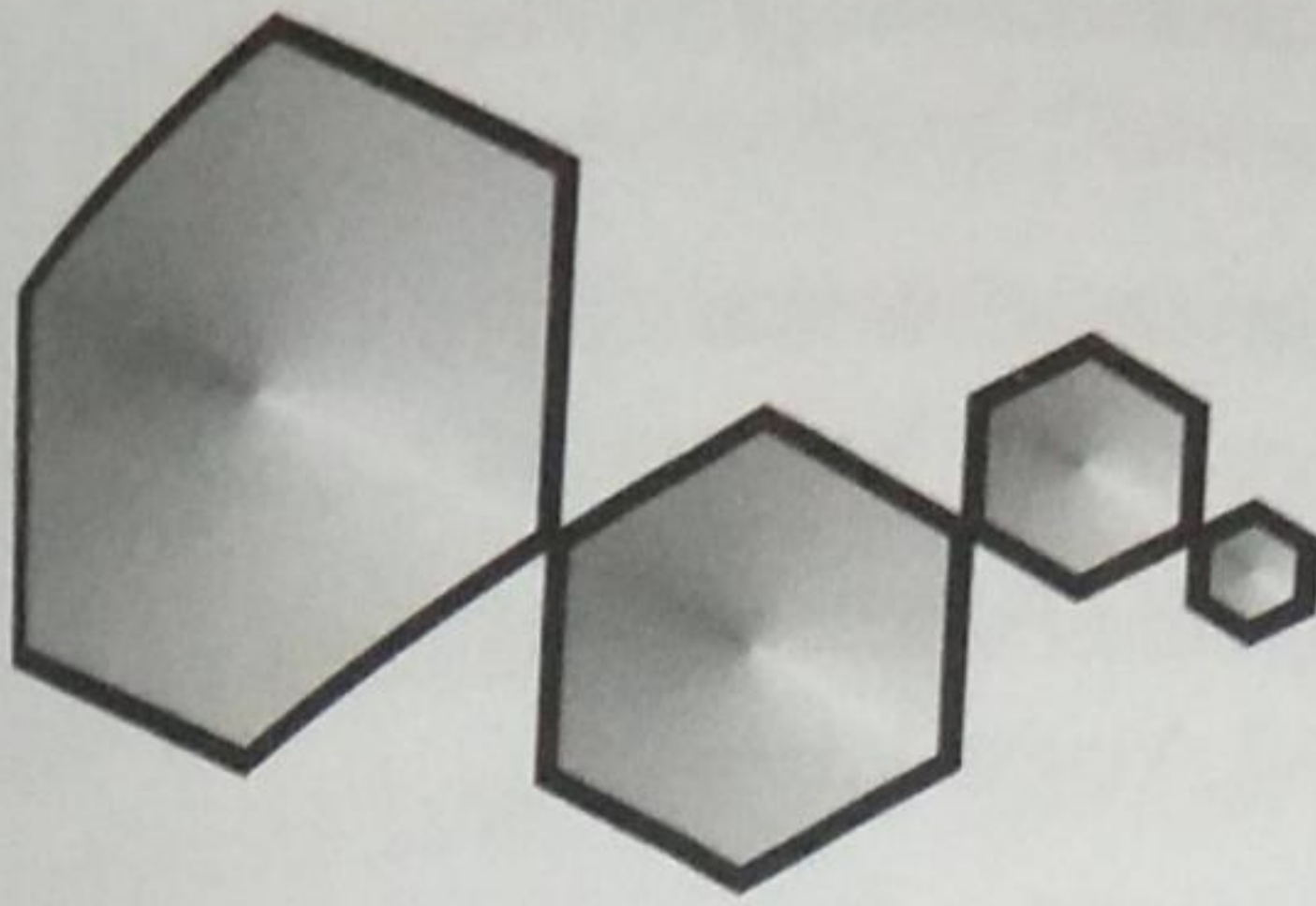
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan klaster industri rumahan adalah dukungan jaringan sosial. Telah ditunjukkan bagaimana jaringan sosial memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal ekonomi dan pekerja, memudahkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Juga ditunjukkan bagaimana jaringan sosial yang memfasilitasi proses transaksi memungkinkan pengusaha menyesuaikan kegiatan usahanya secara lebih fleksibel terhadap naik-turunnya permintaan pasar, misalnya lewat diagregasi vertikal dan sub-kontrak.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi.

Pertama, kebijakan klaster adalah sebuah bentuk inovasi yang dibuat melalui proses penilaian kapasitas rintisan klaster. Pembentukan rintisan klaster dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan bahwa sentra industri rumahan perempuan, tersebut berpotensi untuk dikembangkan dari sentra menjadi klaster awal dan dikembangkan menjadi klaster yang dewasa. Intervensi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pola perkembangan yang terjadi secara alamiah, ini akan lebih baik karena dengan intervensi yang berlebihan dan dipaksakan, mengakibatkan kegagalan.

Kedua, Strategi kelembagaan klaster perlu dikuatkan, mengingat kelembagaan penting sebagai kekuatan kolektif yang dapat mendorong keinginan untuk tumbuh bersama, sehingga motif keinginan individu untuk mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat diminimalisir. Pemerintah perlu mendorong perkembangan sentra menjadi klaster yang ideal.

Ketiga, harus ada sinergi yang lebih harmonis antara akademisi, *Business*/pengusaha dan Pemerintah/*Government* dalam mengembangkan klaster industri rumahan perempuan, dan pemerintah perlu lebih memperhatikan perkembangan klaster.



DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga. 2012. *Kelompok Marjinal dalam PNPM*. Jakarta: The World Bank.
- Andesson, Thomas, et al. 2004. *The Cluster Policies Whitebook*. International Organisation For Knowledge and Enterprise Development (IKED). Sweden
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Rajabasa*. Kalianda: BPS Kabupaten Lampung Selatan.
- Bank Dunia. 2000. *Rangkuman Pembangunan Berperspektif Gender*. Bank Dunia. Jakarta
- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [National Medium-Term Development Plan. RPJMN] 2015-2019*. GOI: Jakarta. p.6.
- Bappenas. 2006. *Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal berdaya Saing Tinggi*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan tertinggal. Bappenas. Jakarta
- Shinukti Prapto Nugroho, Drs. 2011. *Panduan Pengembangan Klaster Industri*. BPPT. Jakarta
- Biggart, Nicole Woosley (Ed.). 2002. *Economic Sociology*. Malden. Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd. dan Richard P. Castanias. 2001. "Collateralized Social Relations: the Social in Economic Calculation"

- dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Volume 60. No. 2 (April 2001).
- Coleman, James S. 1998. "Social Capital in the Creation of Human Capital" dalam *the American Journal of Sociology*. 1988. Volume 94.
- Darwin, Muhadjir. 2000. *Akuntabilitas Pelayanan Publik*. makalah disampaikan dalam Seminar Sehari FISIPOL UGM .Yogyakarta
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia. Cet. XII .Jakarta
- Etzkowitz, Henry. 2008. *The Triple Helix: University, Industry, Government Innovation in Action*. Routledge Taylor & Francis Group. New York and London
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*, Jossey-Bass Publishers San Francisco.
- Granovetter, Mark. 2005. "Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness" dalam *American Journal of Sociology*. Volume 91. Edisi 3. 2005 "the Impact of Social Structure on Economic Outcomes" dalam *Journal of Economic Perspectives*, Volume 19. No. 1 (- Winter) Guntur. 2005. *Keramik Kasongan*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.
- Islami, Fitrah Sari. 2014. Analisis Pola Klaster. *Formasi Keterkaitan Dan Orientasi Pasar (Sentra Industri Krupuk Mie Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jones, Candace. William S. Hesterly. dan Stephen P. Borgatti, 1997. "A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanism" dalam *the Academy of Management Review*. Volume 22. No. 4.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Industri Rumah Tangga di Daerah (Ringkasan)*. Jakarta: Kemen PPPA RI.
- Knorringa, Peter and Jorg Meyer-Stamer, 1998. "New Dimensions in Local Enterprise Co-operation and Development: From Cluster to Industrial Districts".

- ISS. The Hague. Netherland. and The Institute for Development and Peace. University of Duisburg. Germany.
- Kompak, 2017. *Dokumen Laporan Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial 2017-2018*.
- KPPPA RI. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Industri Rumahan*. Jakarta
- KPPPA RI. 2018. *Laporan Evaluasi Industri Rumahan Nasional*. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. *Analisis spasial dan regional: Studi Aglomerasi & Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- L, Lim. 2015. "Extending livelihood opportunities and social protection to empower poor urban informal workers in Asia. A multi-country study: Bangladesh, Indonesia Nepal, Pakistan, Philippines, and Thailand", (Oxfam for Asia Development Dialogue, Thailand).
- M. Oey-Gardiner, E. Suleeman, I. Tjandraningsih, W. Hartanto dan H. Wijaya. 2007. "Women and children homeworkers in Indonesia". S. Mehrotra dan M. Biggeri (2007), "Asian Informal Workers. Global risks, local protection". (Routledge, AS dan Kanada).
- Macaulay, Stewart. 1963. "Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study" dalam *American Sociological Review*. Volume 28. No. 1 (Februari 1963).
- N. Haspels dan A. Matsuura. 2015. "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations". ILO. Jakarta.
- Nee, Victor. 2005. "the New Institutionalism in Economic and Sociology" dalam *the Handbook of Economic Sociology*. Neil J. Smelser dan Richard Swedberg (Eds.), Princeton: Princeton University Press.
- Podolny, Joel M., dan Karen L. Page. 1998. "Network Forms of Organization" dalam *Annual Review of Sociology*. 1998. No. 24.
- Porter, Michael E. 1998. *Cluster and New Economics of Competition*, Harvard Business Review. Nov/Dec 98. Vol 76 Issue 6. p77.

- Powell, Walter. 1990. "Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization" dalam *Research in Organizational Behavior*. Volume 12. 1990.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sujadi, et al. 2008. *Membangun Sinergi Bagi Pengembangan Produk UKM Berbasis Ekspor Di Klaster UKM*. Serenan. Klaten. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi 2008 - IST AKPRIND Yogyakarta
- Schmitz, H. and Nadvi, K. 1999. *Clustering and Industrialization: Introduction*. *World Development*, 27(9):1503-14.
- Susanti, Emy. 2018. *Implementasi Isu Gesi (Gender equality dan Social Inclusion)*. Jakarta. PSG-LPI Universitas Airlangga_ASWGI
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor: 500/1404/V/Bangda Tanggal: 30 Juni 2009 *Pedoman Umum Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster*.
- Tresiana dkk. 2018. *Profil Gender dan Anak Propinsi Lampung*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2019. *Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*. LPPM Unila. Bandar Lampung (Tidak dipublikasikan)
- Tresiana, Novita. 2015. *Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang berperspektif Gender di Propinsi Lampung*. *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 11 Nomor 2, Agustus 2015, Halaman 152-177/25 Halaman. ISSN 1858-0300. Penerbit Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN).
- Untari, R. 2005. *Pola Pertumbuhan Klaster Industri Kecil Indonesia*. Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. (Disertasi), Institute Teknologi Bandung.
- Voss, J. 2008. *PNPM-Rural Baseline Project*. Jakarta: The World Bank. _____
2015. *Rajabasa Dalam Angka 2015*. Kalianda: BPS Kabupaten Lampung Selatan.

2016A. *Statistik Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Kalianda: BPS Kabupaten Lampung Selatan.

2016B. *Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka*. Kalianda: BPS Kabupaten Lampung Selatan.

-oo0oo-

Gender Equality

dan Inovasi Kebijakan Publik

Sebuah Model Inovasi Kebijakan Perintisan Klaster
dalam Pengembangan Industri Rumah-rumahan Perempuan

Buku ini berisi tentang bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan trafficking. Juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian gender equality (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan). Pembahasan buku ini dilengkapi dengan Reposisi Administrasi Publik dalam memahami Gender Equality dengan basis Triple Helix dan pentingnya dukungan jaringan sosial. Pembahasan didasarkan hasil-hasil penelitian tim penulis, yang diperkuat dengan landasan teoritik yang relevan.



Dr. Novita Tresiana Lahir lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1972. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2000. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.



Dr. Noverman Duadji, lahir di Sumatera Selatan 03 November 1969. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2001. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG

ISBN: 978-623-228-013-7



9 786232 280137